

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Halal, merupakan masalah yang cukup fundamental bagi konsumen muslim. Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama untuk mengkonsumsinya. Umat Islam tentunya akan merasa tenteram jika produk produsen tak hanya mengklaim bahwa produknya halal. Makanan yang halal yang masuk menjadi bagian dari tubuh kita akan menjadi sumber energi baru yang sangat bernilai untuk kehidupan. Semua yang halal yang diberikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, akan menjadikan mereka sumber inspirasi dan penyejuk mata pelipur lara untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Sikap lemah lembut, penyayang kepada sesama, santun kepada semua orang, serta akrab kepada lingkungan sekitarnya adalah buah dari makanan halal yang diberikan kepada mereka.

Mengkonsumsi makanan halal dan baik merupakan hal yang tak bisa ditawarkan oleh seorang Muslim, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengonsumsi yang halal dan baik. Meski dalam kenyataannya, banyak umat Islam mengabaikan hal ini. Mereka jarang bersikap kritis pada makanan yang mereka konsumsi. Makanan memberikan pengaruh dalam perilaku keseharian seorang Muslim. Secara spiritual pun berpengaruh. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa terkabulnya doa bergantung pula pada makanan.

Jika makanan yang masuk ke dalam tubuh adalah makanan halal, Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. "Bukankah Allah adalah Mahabersih dan tentunya

hanya menerima mereka yang bersih pula, yaitu mereka yang mengonsumsi makanan halal dan baik saja,”

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, banyak orang yang sangat menjaga pola makannya, agar mendapatkan hidup yang sehat. Kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya muslim, demi mendapatkan makanan sehat biasanya dilihat dari label halal.¹

Label pada produk pangan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pasal 2 ayat 1 *“Bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan”*.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, label harus dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan mengenai sifat, bahan kandungan, asal, daya tahan, nilai ataupun kegunaannya. Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Hanya saja, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, disamping sudah menjadi sifat manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat “kecurangan” baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi “rasa aman” pada konsumen dapat tercapai.

Pencantuman tulisan “halal” diatur oleh keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985. Makanan halal

¹ <http://www.Hukum Online.com>, Minggu, 18 Oktober 2009, 20:15:10

adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah menurut hukum-hukum agama Islam. Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam

Bagi umat Islam dasar hukumnya jelas. Dalam Al-Qur'an secara eksplisit dan kategoris telah disebutkan jenis makanan yang halal dan haram. Seperti larangan memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk / diterkam binatang buas, kecuali sempat menyembelih dengan nama Allah.²

Sebagaimana kita tahu, bahwa Allah SWT mengajarkan kita untuk makan makanan yang halal dan baik, sebagaimana kutipan berikut :

1. QS Al-Baqarah ayat 68:

قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون ﴿٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah apa yang di bumi, **yang halal dan baik**, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan ia adalah musuh yang nyata bagi kamu”.

2. QS Al-Maaidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

² QS. Al-Maidah ayat 3

Artinya: “Makanlah daripada apa yang Allah merezekikan kamu, yang **halal dan baik**, dan takutilah Allah, yang kepada-Nya kamu orang-orang mukmin”.

3. QS Al-Anfaal ayat 69:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

Artinya: “Makanlah daripada apa yang kamu ambil sebagai rampasan perang, **yang halal, yang baik**, dan kamu takutilah Allah; sesungguhnya Allah Pengampun, pengasih”.

4. QS Al-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka makanlah daripada apa yang Allah merezekikan kamu, **yang halal, yang baik**, dan berterimakasihlah atas rahmat Allah, jika Dia kamu sembah”.

Legislasi produk halal di Indonesia bukan hal baru. Permenkes no. 280/Menkes/Per/XI/1976 pasal 2 telah mengatur peredaran dan penandaan makanan yang mengandung bahan asal babi. Singkatnya, wadah atau bungkus makanan mengandung bahan asal babi harus dicantumkan peringatan gambar babi atau tulisan mengandung babi berwarna merah.

SKB Menag dan Menkes no. 427/Menkes/SKB/VII/1985 dan No 68/1985 pasal 1, 2, dan 4 juga mengaturnya. Pasal 2 menyatakan produsen yang mencantumkan

tulisan halal pada label atau penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Menurut pasal 4, pengawasan preventif dilakukan Dirjen POM mengikutkan unsur Depag, sedang di lapangan diawasi oleh aparat Depkes. Fakta menunjukkan pengawasan label halal atau tanda produk mengandung babi, jauh dari harapan. Munculnya heboh lemak babi pada 1988 menghentak kesadaran masyarakat, MUI, dan pemerintah untuk menanganinya lebih serius.

Dalam UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan pasal 30, 34, dan 35. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada di dalam dan atau di kemasan pangan (pasal 30 ayat 1). Label tersebut sekurang-kurangnya memuat a.) Nama produk, b.) Daftar bahan yang digunakan, c.) Berat bersih atau isi bersih, d.) Nama dan alamat pihak yang memproduksi, e.) Keterangan tentang halal, dan f.) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa. Dari penjelasan di atas jelas bahwa pencantuman label halal pada kemasan status produk bukanlah atas dasar pertimbangan pelaku usaha. Masalah halal adalah wewenang Majelis Ulama Indonesia.³

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim jurnal halal LPPOM-MUI, ternyata di masyarakat banyak sekali beredar produk pangan berlabel halal "*illegal*". Ada tiga macam label halal "*illegal*" yang telah ditemukan dari hasil survei tersebut yaitu:

1. Produk pangan kemasan yang baru mendapat sertifikasi halal MUI untuk beberapa jenis produk namun telah mengklaim semua produk yang diproduksinya halal.
2. Produk pangan kemasan yang awalnya telah mendapat sertifikasi halal MUI namun setelah masa berlaku sertifikat halal tersebut habis dan pelaku tidak

³ <http://HalalSehat.com>, 22 Oktober 2009, 20:17:05

memperpanjangnya lagi, label halal yang ada pada kemasan tersebut tidak pernah dicabut.

3. Produk pangan kemasan yang mencantumkan label halal tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh LPPOM-MUI (Lembaga pengkajian pangan dan obat-obatan dan kosmetika) atau produk kemasan pangan tersebut belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI tetapi sudah mencantumkan label halal pada kemasannya. Padahal label halal dan sertifikat halal sangat berkaitan. Izin pelabelan halal pada kemasan hanya diberikan apabila produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Hal ini berarti pelaku usaha telah mencantumkan label halal sesuai dengan persepsi mereka mengenai halal atau haram.⁴

Dari survei tadi, ditemukan pula ada perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikat halal hanya untuk satu produk. Setelah diadakan sosialisasi, sekarang sudah banyak industri menengah kecil yang datang ke BPOM untuk melakukan proses pemeriksaan sertifikasi dan labelisasi halal atas produknya. Banyaknya produk yang dihasilkan oleh industri menengah kecil ini menimbulkan persoalan tersendiri. Terlebih karena ketidaktahuan dan keengganan sebagian pengelola industri kecil untuk melaporkan produknya tersebut, kebanyakan dari mereka tidak tahu prosedur dan aturan pemeriksaan sertifikat halal. Para pengusaha menengah kecil tadi beranggapan untuk memperoleh sertifikat dan label halal harus melalui proses yang rumit dan membutuhkan biaya besar.

Padahal, prosedur mendapatkan sertifikat serta label halal tersebut tidak rumit. MUI pun bersedia membantu bila dirasakan ada kesulitan. Kendati demikian, masih ada beberapa pengusaha menengah kecil yang mungkin enggan untuk memeriksakan kehalalan produknya karena berbagai pertimbangan. Mereka lebih rela untuk mencabut atau menghilangkan label halal pada kemasannya. Ada pula produk yang telah mencantumkan label halal meski belum terdaftar dan memiliki sertifikat halal, baik di pusat maupun di daerah.

⁴ Jurnal Halal LPPOM No. 36, hlm.12

Hasil survei juga menunjukkan banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum mendapatkan sertifikat halal. Artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jika pencantuman label halal ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen muslim. Oleh karena itu jika terjadi kesalahan label yang telah menyesatkan masyarakat, dapat dibayangkan betapa besar dosa yang akan ditanggung oleh pihak yang mengeluarkan label tersebut.

Setiap kali hendak membeli pangan dalam kemasan, yang pertama kali dilihat calon konsumen adalah kemasan dan labelnya. Kemasan itu sangat beragam bentuk dan bahannya. Namun, yang lebih penting adalah label yang terdapat pada kemasan itu. Dari label inilah konsumen mengetahui banyak hal soal produk di dalam kemasan itu. Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan. Yakni sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya. Informasi-informasi ini mesti diperhatikan dengan seksama supaya konsumen tidak salah beli. Selain itu, ada pula informasi yang tidak boleh dicantumkan pada label kemasan. Informasi itu menyangkut hal-hal yang membingungkan dan membuat rancu konsumen. Juga, informasi tentang sesuatu ciri khas yang sebenarnya dimiliki oleh produk pangan sejenis. Umpamanya, tulisan tanpa zat pewarna untuk produk yang memang dilarang menggunakan zat pewarna. Informasi efek pengobatan atau penyembuhan penyakit tertentu, juga tidak boleh dicantumkan pada label kemasan produk pangan

Dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “hak konsumen” adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa”. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian aman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, dalam arti halal. Dalam pasal 4 huruf (c) UUPK juga disebutkan bahwa “konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”. Pasal ini memberikan pengertian bahwa informasi yang diberikan oleh produsen adalah benar dan telah teruji.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah:

- a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.
- b. Terciptanya perdagangan pangan yang Jujur dan bertanggung jawab.
- c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan melihat pada uraian diatas, oleh karena itulah penulis menjadi tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan di atas dengan mengambil judul: **“KONSUMEN DAN LABEL (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Mengkonsumsi Produk Berlabel Halal di Kota Yogyakarta)”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar penulisan menjadi lebih terarah dan sekaligus untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan dikaji dan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan, maka diperlukan pembatasan masalah.

Pembatasan masalah dalam penulisan ini meliputi:

1. Penelitian ini dilakukan di salah satu pasar tradisional di kota Yogyakarta yaitu, pasar Beringharjo. Yang merupakan pasar paling terkenal dan dikunjungi banyak masyarakat di kota Yogyakarta. Dan juga karena di pasar tersebut menjual beberapa makanan khas yang berasal dari Yogyakarta, diproduksi di Yogyakarta, dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat yang berasal dari kota Yogyakarta, dan beredar di kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini memberikan gambaran perlindungan hukum terhadap masyarakat di kota Yogyakarta sebagai konsumen makanan kemasan yang beredar di kota Yogyakarta.
3. Penelitian ini dilakukan di LPPOM dan BBPOM kota Yogyakarta. Karena LPPOM dan BBPOM hanya boleh didirikan di kotamadya dan ibukota propinsi. Karena Yogyakarta memenuhi syarat didirikannya LPPOM dan BPPOM tersebut. maka penulis memilih lokasi di kota Yogyakarta, selain itu kota Yogyakarta lebih dekat dengan domisili penulis sehingga penulis lebih mudah melakukan penelitian.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil label dalam makanan kemasan yang beredar di kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat muslim sebagai konsumen makanan yang beredar di kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Obyektif:

1. Mendeskripsikan profil kehalalan produk pangan kemasan yang beredar di Yogyakarta
2. Mendeskripsikan dan mengeksplanasikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat muslim sebagai konsumen makanan yang beredar di kota Yogyakarta

b. Tujuan Subjektif:

1. Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum perlindungan konsumen, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan halal dan haram sangat penting bagi seorang muslim, dan ini ditunjukkan langsung dengan pengaitan Allah Subhanahu wa Taala antara makanan yang baik dengan amal saleh dan Ibadah. Di dalam hadith shahih yang diriwayatkan Muslim dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah Taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkan Nya kepada para rasul dalam firman Nya: Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS al-mukminun 51).

Kita tidak hanya disuruh untuk memakan makanan yang halal, tapi juga makanan yang baik. Halaalan Thoyyiban, Halal dan baik. Seperti yang terdapat dalam firman Allah, “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (An-Nahl:114) Artinya, selain tidak memakan dengan kriteria haram, kita juga harus makan makanan yang baik (thoyib). Artinya tidak berbahaya bagi tubuh kita. Selain itu berusaha makanan tersebut harus bergizi dan baik bagi tubuh kita. Kita sebagai umat Islam, harus cerdas dalam memilih makanan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Pencantuman label halal pada produk haram harus juga ditindak sebagai tindakan pidana. Kalau ditemukan produsennya, hukum seberat-beratnya karena mereka sudah menipu. Dalam agama Islam jelas disebutkan oleh Alquran: “Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di

bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS 2:168)

Diantara jenis makanan yang diharamkan oleh Islam karena berbahaya bagi kesehatan atau pada akhlak manusia. Ada jenis makanan yang dianjurkan agar ditinggalkan karena jenis makanan itu melemahkan badan dan jiwa. Demikian pula karakteristik makanan itu ada yang membahayakan sehingga dilarang agama, ada juga yang bermanfaat kemudian dianjurkan untuk diikutinya. Dalam norma makanan Islam berbeda dengan ilmu pengetahuan modern.⁵

Islam tidak hanya sekedar menitikberatkan pada aspek materi semata, dan juga tidak sekedar menitikberatkan pada aspek pembinaan tubuh semata akan tetapi islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan perilakunya.⁶

Islam menyuruh kita untuk menjauhi barang yang diharamkan karena makanan yang dimakan akan mendarah daging dalam tubuh. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab doa seseorang tidak di ijabah oleh Allah swt. Disamping halal, umat Islam dianjurkan untuk mencari makanan yang baik untuk tubuh guna menjaga kecerdasan mental dan fisik seseorang. Jika tubuh senantiasa sehat, insya Allah kita bisa lebih khusyu' dalam beribadah kepada Allah swt. hal ini ditegaskan dalam firman Allah “(Dikatakan kepada mereka) “Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.”” (At Tur : 19).⁷

⁵ Ahmad Syauqi Al Fanjari, 1996, “Nilai Kesehatan Dalam Syari’at Islam”, hlm.44, Sinar Grafika Offset, Cet. 1, Jakarta.

⁶ *Ibid.*

⁷ percikaniman.org, 27-12-2008 / 13:14:07

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang dimaksud dengan Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan juga diberikan definisi mengenai Pangan Halal yaitu “pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.

Bagi konsumen muslim, label halal adalah satu hal yang sangat penting keberadaannya. Karena mengonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama yang sifatnya mutlak.

Di Indonesia, label halal telah mendapatkan legitimasi yang sangat kuat dalam hukum, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan”. Pasal 30 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan “label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat

sekurang-kurangnya keterangan mengenai halal”. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 30 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 dinyatakan keterangan halal untuk suatu produk sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Adapun keterangan halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal atau haram. Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pasal 5 huruf a UUPK menyatakan “pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘halal’ yang dicantumkan dalam label”.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

PP Nomor 69 Tahun 1999 ini merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang secara detil mengatur tentang halal. Buktinya Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999 menyatakan “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999 menyatakan “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk

diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam penjelasan pasal 11 ayat (1) pp nomor 69 tahun 1999 dinyatakan pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela, namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Label halal pada suatu produk dapat menjadi suatu acuan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk. Jika hal ini saja tidak dapat dipercaya, dengan cara bagaimana lagi para konsumen muslim dapat dengan 100% yakin makanan dan minuman yang dikonsumsi sudah memenuhi syariat agama Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami⁸

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum

⁸ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hokum, Jakarta: UI Press, 1986, hal 67

yang dilakukan dengan pendekatan *non doktrinal kualitatif*.⁹ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini secara spesifik lebih *bersifat deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.¹⁰

Dalam hal ini penulis bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang profil kehalalan produk pangan kemasan yang beredar di Yogyakarta, perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat muslim sebagai konsumen makanan yang beredar di kota Yogyakarta dan peran yang dilakukan LPPOM MUI Yogyakarta dan BPOM Yogyakarta dalam rangka melindungi konsumen muslim terhadap masalah kehalalan produk pangan kemasan yang beredar di Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu

⁹ Soetandyo Wignjosebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Hal 1 dan 3

¹⁰ Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta: UI Press, Cet, III 1986. hal. 12

pertama karena daerah ini merupakan daerah yang termasuk kota besar yang memungkinkan peneliti mudah memperoleh data yang diinginkan. **Kedua**, lokasi yang dipilih merupakan produsen makanan yang cukup besar dan menyediakan makanan khas Yogyakarta sehingga memungkinkan peneliti mudah memperoleh data yang dibutuhkan.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data-data sekunder yang ada.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

1. Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
2. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder yang berbentuk format-format khusus, yang dinuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara (*interview*)

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.¹¹

c. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

¹¹ Moh. Nazir, Ph. D, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. hal. 193-194.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja.¹²

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.¹³

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi

¹² Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991, hal. 80.

¹³ Sanapiah Faisal, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Produk Pangan Dalam Syariat Islam
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Makanan dan Minuman
 - 2. Pandangan Hukum Islam Tentang Pangan
 - 3. Makanan dan Minuman Halal
 - 4. Makanan dan Minuman yang *Thoyyib*

B. Tinjauan Umum Tentang Pangan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pencantuman kata-kata halal dalam produk pangan kemasan
2. Ketentuan label dalam produk pangan kemasan yang tercantum di dalam Undang – undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
3. Syarat edar produk pangan kemasan halal

C. Umum

1. Pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen
2. Aspek perlindungan konsumen
3. Undang-undang Perlindungan Konsumen
 - a. Pengertian pelaku usaha
 - b. Hak dan kewajiban pelaku usaha
 - c. Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha
 - d. Pencantuman klausa baku
 - e. Sengketa konsumen dan acara peradilan
 - f. Sanksi terhadap pelanggaran UUPK

D. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal
2. Persyaratan kehalalan produk dalam sertifikasi halal
3. Proses sertifikasi halal
4. Masa berlakunya sertifikasi halal
5. Pemberian sertifikasi halal

- E. Label / Sertifikasi Halal
 - 1. Pengertian label pangan
 - 2. Pengertian penandaan
 - 3. Ketentuan penandaan
- F. LPPOM-MUI
 - 1. Tugas LPPOM
 - 2. Fungsi LPPOM
 - 3. Wewenang LPPOM
- G. Balai Besar POM
 - 1. Tugas BBPOM
 - 2. Fungsi BBPOM
 - 3. Wewenang BBPOM
- H. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil label dalam makanan kemasan yang beredar di kota Yogyakarta
- B. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat muslim sebagai konsumen makanan yang beredar di kota Yogyakarta

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA